

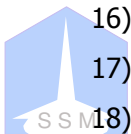
Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

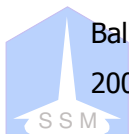
6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator daerah dalam pembangunan koperasi mencakup 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu indikator kelembagaan koperasi, indikator usaha, dan indikator peran pemerintah dan pembangunan wilayah. Indikator berjumlah 18 yaitu :
 - 1) Jumlah koperasi
 - 2) Jumlah anggota koperasi
 - 3) Kualitas koperasi, yang terdiri atas : (a) koperasi aktif, (b) pelaksanaan RAT, (c) koperasi penerima penghargaan, dan (d) koperasi klasifikasi
 - 4) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia koperasi
 - 5) Volume usaha (output) koperasi
 - 6) Permodalan koperasi
 - 7) Tabungan / simpanan anggota koperasi
 - 8) Investasi koperasi
 - 9) Asset koperasi
 - 10) Ekspor koperasi
 - 11) Kredit perbankan untuk koperasi
 - 12) Sisa Hasil Usaha (SHU)
 - 13) Dana perkuatan untuk koperasi
 - 14) Dana dekonsentrasi untuk pembangunan koperasi
 - 15) Anggaran pembangunan koperasi daerah
 - 16) Penyerapan tenagakerja koperasi
 - 17) Nilai tambah koperasi
 - 18) Pembayaran pajak koperasi.



2. Indikator yang termasuk dalam bobot lima besar teratas adalah kualitas koperasi, anggaran pembangunan koperasi daerah, peningkatan kualitas SDM, volume usaha, dan jumlah koperasi. Sedangkan indikator yang termasuk dalam lima besar terbawah adalah ekspor koperasi, pajak koperasi, SHU, kredit koperasi, dan asset koperasi.
3. Indikator-indikator yang dihasilkan dalam studi ini sangat memadai untuk menjelaskan performa daerah dalam pembangunan koperasi, karena indikator tersebut mewakili koperasi, pembangunan wilayah dan nasional.
4. Model untuk analisis pemeringkatan disebut sebagai *Cooperative Development Regional Performance (CDRP)*. Model ini sangat memadai untuk menjelaskan pemeringkatan karena menggunakan metode indeks yang merangkum berbagai indikator yang berbeda jenis dan menginteraksikan performa koperasi (*Regional Cooperative Size / RCS*) dengan pembangunan wilayah dan nasional (*Regional Development Size / RDS*) secara integratif. Untuk menentukan rating dan peringkat digunakan *Cooperative Index of CDRP (CICDRP)*.
5. RCS yang tinggi pada sebuah propinsi belum tentu menunjukkan kemampuan propinsi dalam pembangunan koperasi, karena masih sangat tergantung pada kemampuan ekonomi propinsi tersebut (RDS). Dalam kasus ini ditunjukkan oleh Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan antara lain jumlah koperasi.
6. Dari uji sahih penerapan model diperoleh peringkat propinsi sampel dalam pembangunan koperasi pada tahun 2006 secara berturut-turut adalah :
 - a) Bali (1)
 - b) Sulawesi Selatan (2)
 - c) NTB (3)
 - d) Sumatera Barat (4)
 - e) Sumatera Utara (5)



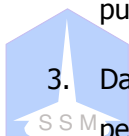
Bali dan Sulawesi Selatan selalu berada pada posisi peringkat teratas selama tahun 2004 – 2006.

7. Dari uji sahih penerapan model CDRP, Propinsi Bali pada umumnya menunjukkan performa baik.
8. Persediaan data sangat terbatas untuk analisis secara komprehensif berdasarkan model CDRP. Data yang tidak tersedia dan belum menjadi bagian dari statistik pembangunan koperasi dan wilayah adalah :
 - a) Pembiayaan pendidikan koperasi,
 - b) Investasi koperasi,
 - c) Asset dunia usaha propinsi dan nasional,
 - d) Ekspor koperasi,
 - e) Kredit perbankan untuk koperasi,
 - f) Dana perkuatan / bergulir,
 - g) Dana dekonsentrasi,
 - h) Nilai tambah koperasi,
 - i) Pembayaran pajak koperasi.
9. Pemeringkatan ini dapat berguna dalam penetapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk periode berikutnya. Juga sekaligus dapat memberikan potret kepemimpinan daerah baik pihak eksekutif maupun legislatif daerah yang bersangkutan.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Indikator dan model CDRP yang dihasilkan pada studi ini dapat digunakan untuk memeringkat seluruh propinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
2. Untuk meningkatkan posisi daerah dalam pembangunan koperasi, pemerintah pusat dan daerah perlu memperhatikan indikator yang bernilai rendah.
3. Dalam rangka pemeringkatan daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) dalam pembangunan koperasi sebaiknya menggunakan model CDRP.



4. Pemerintah Pusat dan setiap Pemerintah Daerah (Kementerian Negara KUKM, Dinas-dinas KUKM, BPS Daerah dan Pusat) sebaiknya menampilkan statistik pembangunan koperasi sesuai dengan indikator-indikator pemeringkatan ini. Dalam rangka ini, Menteri Negara KUKM mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara KUKM (Permen KUKM).
5. Untuk mengetahui sejauhmana posisi masing-masing daerah dalam pembangunan koperasi dan meningkatkan semangat berkompetisi dan dayasaing dalam era globalisasi, sebaiknya dilaksanakan kegiatan pemeringkatan daerah (propinsi, kabupaten, kota) setiap tahun.
6. Untuk menjaga independensi dan obyektifitas, pelaksana pemeringkatan daerah dalam pembangunan koperasi sebaiknya oleh lembaga independen yang mempunyai kompetensi dalam bidang *assessment / rating*.
7. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masing-masing *stakeholder* baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
8. Perlu dilakukan pelatihan kepada petugas yang terkait dengan implementasi pemeringkatan baik dari unsur pemerintah tingkat pusat maupun daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. H.R. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Penerbit, Graha Ilmu, Jakarta.
- AG. Suyono, Irsjad Muchtar, Toto I. Suparto, Sri Sukmawati, Erizul Syafrida, A. Maryetta, Bambang Wahyu, dan Banu Astono. 1995. Koperasi Dalam Sorotan Pers. Agenda yang tertinggal dalam rangka 50 tahun RI. Sh.
- Anonim. 1980. Koperasi Sebuah Pengantar. Departemen koperasi, Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi. Jakarta.
- _____. 1992. Pembangunan Koperasi Pertanian di Asia Tenggara. ACEDAC.
- _____. 1992. Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Dasar Koperasi Menghadapi Globalisasi. Infokop-Media Pengkajian Perkoperasian, ISSN: 0126-813x, nomor 11 tahun IX, Mei.
- _____. 2005. World Investment Report 2005. UNCTAD, Jeneve-Swiss.
- _____. 2007. Pemeringkatan Daerah Dalam Pembangunan Koperasi. Asisten Deputi Urusan Penelitian Koperasi, Deputi Bidang Pengkajian KUKM, Kemneterian Negara KUKM. Uji coba Konsep.
- Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. 2006. Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2006. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Makassar.
- BI Nusa Tenggara Barat. 2007. Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.
- Biro Hukum dan Ham Sumbar. 2006. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian di Propinsi Sumatera Barat. Biro Hukum dan Ham, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, Padang.
- BI Sulawesi Selatan. 2007. Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- BI Sumatera Barat. 2007. Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- BI Sumatera Utara. 2007. Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Provinsi Sumatera Utara, Medan.
- Böök, Sven Ake. 1994. Nilai-nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi. Koperasi Jasa Audit Indonesia. Jakarta.



- Bowen, HP, Wim Moesen, Leo Sleuwaegen. 2006. A Composite Index of The Creative Economy With Application To Regional Best Practices. Vlerick Leuven Gent Management School.
- BPPMD Sulawesi Selatan. 2006. Daftar Inventarisasi Perizinan bagi Perusahaan PMDN/PMA yang Telah Memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal (SP) di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Tahun 2001 – 2006. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- BPS Bali. 2007. Bali dalam Angka Tahun 2006. Badan Pusat Statistik Propinsi Bali, Bali.
- BPS NTB. 2007. Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2006/2007. Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Mataram.
- BPS Sulawesi Selatan. 2007. Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2006. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- BPS Sumbar. 2006. Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha 2002 – 2006. Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, Padang.
- BPS Sumbar. 2007. Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2006. Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, Padang.
- BPS Sumbar. 2007. Berita Resmi Statistik. Hasil Pendaftaran (*Listing*) Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi 2006. Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, Padang.
- BPS Sumut 2006. Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2006. Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara, Medan.
- Bronson, Richard. 1982. Operations Research. Schaums's Outline Series. International Edition.
- Dekopinwil Sulawesi Selatan. 2007. Program dan Rencana Aksi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Koperasi. Dekopin Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Dimiyati, Tjuju Tarliah dan Ahmad Dimiyati. 1987. Operations Research. Model-model Pengambilan Keputusan. Sinar Baru Algensindo.
- Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan. 2007. Rekapitulasi Data Keuangan Koperasi Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan, Tahun 2002 – 2007. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan. 2006. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Dinas Koperasi dan UKM Sumut. 2005. Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Tahun 2005 – 2009. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Medan.



- Dinas KUKM NTB. 2004. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Koperasi. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.
- Dinas KUKM NTB. 2007. Rencana Stratejik (Renstra) Pembangunan Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 - 2008. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.
- Djamhari, Choirul. 1984. Memperkokoh Pilar-pilar Kemandirian Koperasi. Antologi Esei Badan Litbangkop-Depkop. Editor. Jakarta.
- Effendy, Johan, IH Sudibyo, Kusumastuti, I Wayan Dipta, A. Junaedi, Ady Yushan, Thalibul Arifin, dan Irawan. 1988. Dengan koperasi Menuju Demokrasi Ekonomi. Tekad Presiden Soeharto. Penyunting. Badan Litbangkop-Depkop. Jakarta.
- Hanel, Alfred, Prof. DR. 1988. Organisasi Koperasi. Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-negara Berkembang. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Johnson, Glenn L. 1986. Research Methodology for Economists. Philosophy and Practice.
- Makridakis, Spiro and Steven C. Wheelwright. 1989. Forecasting Methods for Management. Fifth Edition.
- MD. Sagimun. 1985. Koperasi Indonesia. Inti Dayu Press, Jakarta.
- Menegkop dan UKM, RI. 2005. Koperasi Terbaik di Seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta.
- Menegkop dan UKM, RI. 2006. Profil Koperasi Berprestasi Tahun 2006. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta.
- Menegkop dan UKM, RI. 2007. Data Pendukung Pemberdayaan KUKM. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Jakarta.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis dan Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. UI Press, Jakarta.
- Muenkner, Hans H. 1988. Pengantar Hukum Koperasi. Dengan Acuan Khusus Mengenai Perundang-undangan Koperasi di Indonesia. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Mulyono, Sri. 1999. Operations Research. Lembaga Penerbit FE-UI
- Nasendi, BD dan Affendi Anwar. 1985. Program Linier dan Variasinya. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Partomo. T.S. dan Soejoedono. 2002. Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan Koperasi. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.



- Pemerintah Provinsi Sumut. 2004. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Medan.
- Situmorang, Johnny W. 2007. Sektor Industri Manufaktur Tujuan PMDN dan PMA. Kajian Pemeringkatan PMDN dan PMA Berdasarkan Sektor. CBES-Communication Paper kepada Menteri Perdagangan RI. Jakarta.
- _____. 2007. Banten Peringkat Pertama Dalam Menarik PMA. CBES-Communication Paper. Jakarta.
- _____. 2007. Kalimantan Tengah Peringkat Pertama Dalam Menarik PMDN. CBES-Communication Paper. Jakarta.
- Situmorang, Johnny W, Pariaman Sinaga, dan Rinie Sriyanti. 2006. Prototipe Model Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan Cooperative Membership Dignity Index. Studi Kasus Koperasi di Kabupaten Bandung. Majalah Infokop, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian KUKM, Jakarta, Desember.
- Syarif, Teuku, Dicedick Suhada, Asep Komaruddin, Rapma Siahaan, AA Sri Adnyani, dan Paruhuman Nasution. 1991. Abstraksi Makalah-makalah Perkoperasian. TNPP dan Perpustakaan Badan Litbangkop-Depkop. Editor, Jakarta.
- Taha, Hamdy A. 1982. Operations Research. An Introduction. Third Edition.
- Tarigan. R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta.
- Watkins, WP. 1986. Co-opewrative Principles. Today & Tomorrow. Holyoake Books, May.
- Wirasasmita, RA Rivai, N. Kusno, dan Erna Herlinawati. 1990. Manajemen Koperasi. Pionir Jaya.

